

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA NUMFOR
(568678)**

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2025**



Jln. Angkasa No. 1
Kab. Biak Numfor – Numfor Timur

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Numfor, 31 Desember 2025
Kepala Kantor UPBU Numfor



ARIE TRILAKSONO PUTRO
NIP. 197610251998031001

	Hal
Kata Pengantar	1
Ringkasan	2
Pernyataan Tanggung Jawab	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	9
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	10
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	20
B.2. Belanja Negara	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.2. Aset Tetap	27
C.3. Piutang Jangka Panjang	28
C.4. Aset Lainnya	33
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	32
C.6. Ekuitas	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak - LO	36
D.2. Beban Pegawai	36
D.3. Beban Persediaan	37
D.4. Beban Barang dan Jasa	37
D.5. Beban Pemeliharaan	38
D.6. Beban Perjalanan Dinas	38
D.7. Beban Barang Untuk diserahkan pada masyarakat	39
D.8. Beban Bantuan Sosial	39
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
E.1. Ekuitas Awal	42
E.2. Surplus/Defisit Pos LO	42
E.2. Koreksi Nilai Persediaan	42

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan TA 2022	2
Tabel 2 : Ringkasan Neraca TA 2023 dan TA 2022	2
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	20
Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	20
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022	21
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023	22
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022	22
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022	23
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022	24
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022	24
Tabel 12 : Rincian Aset Lancar TA 2023 dan TA 2022	25
Tabel 13 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	25
Tabel 14 : Rincian Persediaan	27
Tabel 15 : Rincian Aset Tetap	27
Tabel 16 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
Tabel 17 : Rincian Aset Lainnya	31
Tabel 18 : Rincian Aset Tak Berwujud	31
Tabel 19 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek	31
Tabel 20 : Rincian Pendapatan PNBK-LO	37
Tabel 21 : Rincian Beban Pegawai	37
Tabel 22 : Rincian Beban Persediaan	38
Tabel 23 : Rincian Beban Jasa	38
Tabel 24 : Rincian Beban Pemeliharaan	39
Tabel 25 : Rincian Beban Perjalanan Dinas	39
Tabel 26 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	40
Lampiran A1 : Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap	
Lampiran A2 : Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.069.210.269,- atau mencapai 2238 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 92.447.000.-

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 16.124.776.166,- atau mencapai 71.05 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 22.693.670.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 75.247.923.964,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 232.942.736,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 75.014.981.228;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 75.247.923.964,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 526.937.429,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 20.180.019.093,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. -19.653.081.664,- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,- dan sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. Rp. -19.653.081.664,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 80.845.439.731,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. -19.653.081.664,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 14.055.565.897,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 75.247.923.964,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
NUMFOR**

Jln. Angkasa No. 1
Numfor - Timur

Telepon. (0981) 22737
Faximile. (0981) 22737

Kode Pos. 98171
Numfor - Papua

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Numfor, 31 Desember 2025

Kepala Kantor UPBU Numfor



ARIF TRILAKSONO PUTRO
NIP 19761025 199803 1 001

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TA 2025 DAN TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thn Anng	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	92,447,000	2,069,210,269	2238.27	154,096,160
Jum Pendpt Negara & Hibah		92,447,000	2,069,210,269	2238.27	154,096,160
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3,565,826,000	3,563,955,028	99.95	2,946,846,362
2. Belanja Barang	B.2.2.	5,452,559,000	3,885,536,438	71.26	3,128,027,624
3. Belanja Modal	B.2.3.	13,675,285,000	8,675,284,700	0.00	36,685,763,140
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Negara		22,693,670,000	16,124,776,166	71.05	42,760,637,126

II. NERACA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN TA 2024

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	232,942,736	50,083,840
Jumlah Aset Lancar		232,942,736	50,083,840
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	16,508,015,000	16,508,015,000
Peralatan dan Mesin	C.15	17,534,075,749	17,534,075,749
Gedung dan Bangunan	C.16	30,921,904,645	27,470,028,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	291,964,423,955	251,597,525,600
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	35,143,490,300
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(281,913,438,121)	(269,000,051,598)
Jumlah Aset Tetap		75,014,981,228	79,253,083,051
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	-	7,133,011,860
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	7,133,011,860
JUMLAH ASET		75,247,923,964	86,436,178,751
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	5,590,739,020
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	5,590,739,020
JUMLAH KEWAJIBAN		-	5,590,739,020
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	75,247,923,964	80,845,439,731
JUMLAH EKUITAS		75,247,923,964	80,845,439,731
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		75,247,923,964	86,436,178,751

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	526,937,429	104,596,160
JUMLAH PENDAPATAN		526,937,429	104,596,160
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,563,955,028	2,946,846,362
Beban Persediaan	D.3	176,868,774	190,536,810
Beban Barang dan Jasa	D.4	397,005,055	859,084,900
Beban Pemeliharaan	D.5	3,070,084,713	1,846,833,022
Beban Perjalanan Dinas	D.6	58,719,000	293,858,052
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	12,913,386,523	2,314,424,724
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		20,180,019,093	8,451,583,870
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(19,653,081,664)	(8,346,987,710)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	49,500,000
Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			49,500,000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(19,653,081,664)	(8,297,487,710)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(19,653,081,664)	(8,297,487,710)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam
rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024
EKUITAS AWAL	80,845,439,731	46,536,386,475
SURPLUS/DEFISIT – LO	(19,653,081,664)	(8,297,487,710)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Selisih Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	-
Koreksi Lain-Lain	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	14,055,565,897	42,606,540,966
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	(5,597,515,767)	34,309,053,256
EKUITAS AKHIR	75,247,923,964	80,845,439,731

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor

Visi Kementerian Perhubungan adalah “ Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah ” Sedangkan Misi Kementerian Perhubungan :

01. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi
02. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Transportasi Untuk Mendukung Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah
03. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Transportasi
04. Melanjutkan Konsolidasi Melalui Restrukturisasi dan Reformasi Di Bidang Peraturan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia (Sdm), dan Penegakan Hukum Secara Konsisten
05. Mewujudkan Pengembangan Teknologi Transportasi Yang Ramah Lingkungan Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

Bandar Udara Numfor adalah Bandar Udara Kelas III dengan panjang landasan 1.755 M x 30 M, namun hingga saat ini belum memiliki fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan penerbangan yang memenuhi standar pelayanan minimum, maka Bandar Udara Numfor terus berbenah dengan mengusulkan pembangunan fasilitas infrastruktur serta bangunan penunjang lainnya. Fasilitas utama guna pelayanan jasa penerbangan seperti apron, taxiway, bangunan terminal dan bangunan kantor telah selesai dibangun pada Tahun Anggaran 2013, sedangkan fasilitas lainnya akan terus diupayakan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Bandar Udara Numfor sebagai salah satu UPT di Kementerian Perhubungan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

01. Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal
02. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah
03. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi
04. Peningkatan Kualitas Sdm dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi
05. Meningkatkan Pengembangan Teknologi Transportasi yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor UPBU Numfor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor UPBU Numfor. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	92,447,000	92,447,000
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	92,447,000	92,447,000
Belanja		
Belanja Pegawai	3,238,389,000	3,565,826,000
Belanja Barang	4,768,405,000	5,452,559,000
Belanja Modal	15,975,285,000	13,675,285,000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	23,982,079,000	22,693,670,000

Realisasi

Pendapatan

Rp.2.069.210.269,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 2.069.210.269,- atau mencapai 2238.27 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 92.447.000. Pendapatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	92,447,000	2,069,210,269	2,238.27
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	92,447,000	2,069,210,269	2,238.27

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2025 mengalami kenaikan 1,242.80 persen dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II 2025 dan Semester II 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
Pendapatan Jasa	2,069,210,269	154,096,160	1242.80
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	2,069,210,269	154,096,160	1242.80

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp.16.124.776.166,- Realisasi Belanja Semester II 2025 adalah sebesar Rp. 16.124.776.166,- atau 71.05% dari anggaran belanja sebesar Rp.22.693.670.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,565,826,000	3,563,955,028	99.95
Belanja Barang	5,452,559,000	3,885,536,438	71.26
Belanja Modal	13,675,285,000	8,675,284,700	63.44
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	22,693,670,000	16,124,776,166	71.05
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	22,693,670,000	16,124,776,166	71.05

Dibandingkan dengan semester II Tahun 2024, Realisasi Belanja Semester II Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (62.29 %) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal mengalami penurunan di TA 2025, karena adanya penghematan dari kementerian perhubungan.
2. Pengadaan Belanja Modal merupakan Penyelesaian Belanja Modal Tahun 2024 yang diselesaikan di Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,563,955,028	2,946,846,362	20.94
Belanja Barang	3,885,536,438	3,128,027,624	24.22
Belanja Modal	8,675,284,700	36,685,763,140	(76.35)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	16,124,776,166	42,760,637,126	(62.29)

Belanja Pegawai

Rp.1.733.354.786.-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.563.955.028,- dan Rp. 2.946.846.362,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Semester I TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 20.94 persen dari TA 2025.

1. Karena adanya Penambahan Pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,453,102,028	2,946,846,362	17.18
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	110,853,000	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3,563,955,028	2,946,846,362	20.94
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	3,563,955,028	2,946,846,362	20.94

Belanja Barang

Rp.3.885.536.438,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.885.536.438,- dan Rp.3.128.027.624,- Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami Kenaikan 24.22% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

1. Karena adanya Efisiensi Anggaran.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	320,905,208	747,025,400	(57.04)
Belanja Barang Non Operasional	0	21,245,000	-
Belanja Jasa	76,099,847	90,814,500	-
Belanja Pemeliharaan	3,345,586,713	1,933,348,672	73.05
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	58,719,000	293,858,052	(80.02)
Belanja Barang Persediaan	84,225,670	41,736,000	100.00
Jumlah Belanja Kotor	3,885,536,438	3,128,027,624	24.22
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	3,885,536,438	3,128,027,624	24.22

Belanja Modal

Rp.8.675.284.700,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.675.284.700,- dan Rp. 36.685.763.140,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar -76.35% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Efisiensi Anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,675,284,700	36,685,763,140	(76.35)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	8,675,284,700	36,685,763,140	-76.35
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	8,675,284,700	36,685,763,140	-76.35

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Komputer Dan Mesin Fotocopy	0	0	0.00
Meubelair	0	0	0.00
Pengadaan dan pemasangan X-RAY CABIN	0	0	
Dengan Aplikasi TIP			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- .

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Pengadaan dan pemasangan pagar wiremesh		0	0.00
Pengadaan dan pemasangan pagar Pengembangan Bandar Udara	0		0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	1
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.675.284.700,- dan Rp. 36.685.763.140,- Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami Penurunan sebesar 76.35 % dibandingkan Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	Naik (Turun) %
Pengembangan Bandar Udara	8,675,284,700	-	0
Jembatan	0	36,685,763,140	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	8,675,284,700	36,685,763,140	-76.35

Pendapatan PNB
Rp. 526.937.429,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada semester II 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 526.937.429,- dan Rp. 104.596.160,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	67,904,500	96,850,400	(30)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	7,745,760	
Pendapatan Penggunaan Sarana & Prasarana	7,935,840		
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	451,097,089	0	0
Jumlah	526,937,429	104,596,160	404

Pendapatan Jasa Merupakan pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari:

- Pendapatan jasa berupa PJP2U,PJP4U check in counter

Beban Pegawai
Rp.3.563.955.028,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.563.955.028,- dan Rp. 2.946.846.362,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai semester II 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunj. PNS	1,565,748,801	1,506,575,935	4
Beban Gaji dan Tunj. PPPK	260,793,260	0	
Beban Tunjangan Kinerja	1,626,559,967	1,340,272,427	
Beban Lembur	110,853,000	99,998,000	
Jumlah	3,563,955,028	2,946,846,362	21

*Beban Persediaan
Rp. 176.868.774,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada semester I 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 176.868.774,- dan Rp. 190.536.810,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan semester II 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	176,868,774	190,536,810	(7)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	176,868,774	190,536,810	(7)

*Beban Barang dan
Jasa Rp.
397.005.055,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa semester II 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 397.005.055,- dan Rp. 859.084.900,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	259,884,068	599,836,150	(56.67)
Beban Honor Operasional Satker	0	94,878,000	(100.00)
Beban Honor Output Kegiatan	0	6,120,000	
Belanja Barang Operasional Lainnya	61,021,140	45,873,250	33.02
Beban Bahan	0	15,125,000	0.00
Beban Barang Non Operasional Lain	0	0	0.00
Beban Langganan Listrik	58,697,947	28,500,000	0.00
Beban Langganan Telepon	0	12,000,000	0.00
Beban Jasa Lainnya	17,401,900	420,000	0.00
Beban Daya Tahan tubuh	0	6,438,000	0.00
Beban Jasa Konsultan	0	49,894,500	0.00
Jumlah	397,005,055	859,084,900	(53.79)

Beban

Pemeliharaan

Rp.3.070.084.713,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan semester II 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.070.084.713,- dan Rp. 1.846.833.022,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan semester II 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan semester 2025 dan 2024

Uraian	TH 2025	TH 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	844,408,838	721,280,622	17
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	256,010,000	266,118,800	(4)
Beban Pemeliharaan Jaringan, Jalan & Jembatan	1,919,715,875	755,143,000	154
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	49,950,000	75,250,000	(34)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	29,040,600	(100)
Jumlah	3,070,084,713	1,846,833,022	66

Beban Perjalanan

Dinas

Rp.58.719.000,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas semester II 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.719.000,- dan Rp. 293.858.052,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas semester II 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	58,719,000	293,858,052	(80)
Jumlah	58,719,000	293,858,052	(80)

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp.12.913.386.523,

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk semester II 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.913.386.523,- dan Rp. 2.314.424.724,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk semester II 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	1,374,430,381	1,488,553,702	(8)
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	640,531,540	588,979,734	9
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7,992,453,096	137,166,646	5,727
Beban Penyusutan Irigasi	2,905,971,506	99,724,642	2,814
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
Jumlah	12,913,386,523	2,314,424,724	458

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih R.0,-

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk semester II 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk semester I 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Semester II 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Surplus dari
Kegiatan
Operasional
Rp(19.653.081.664)

D.9 Kegiatan Operasional

Jumlah surplus dari kegiatan Operasional pada semester II TA 205 dan TA 2024 adalah Rp. (19.653.081.664) dan Rp. (8.346.987.710).

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional Rp.0,-

D.10 Kegiatan Non Operasional

Jumlah surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 49.500.000,-. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp.

80.845.439.731,-

Nilai ekuitas pada semester II 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 80.845.439.731,- dan Rp.46.536.386.475,-

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp.

(19.653.081.664),

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada semester II 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp.(19.653.081.664),- dan Rp. (8.297.487.710),- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Aset

E.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non

Revaluasi

Rp.0,-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada semester II 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp.0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp. 75.247.923.964

Nilai Ekuitas pada semester II 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 75.247.923.964,- dan Rp.80.845.439.71,-.

**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada TA 2025**

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	Peralatan dan Mesin		17.534.075.749	15.121.380.261	2.412.695.488
1	Alat Besar Darat	1	59.505.000	59.505.000	0
2	Alat Bantu	3	438.930.000	438.930.000	0
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	12	10.218.736.750	9.688.455.761	530.280.989
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20	108.480.000	108.480.000	0
5	Alat Bengkel Bermesin	2	3.750.000	3.750.000	0
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	9	47.240.000	47.240.000	0
7	Alat Pengolahan	2	110.800.000	110.800.000	0
8	Alat Kantor	27	1.011.894.320	1.009.903.320	1.991.000
9	Alat Rumah Tangga	126	348.615.680	348.615.680	0
10	Alat Studio	2	3.000.000	3.000.000	0
11	Alat Komunikasi	5	19.525.000	19.525.000	0
12	Peralatan Pemancar	6	177.700.000	177.700.000	0
13	Komputer Unit	14	243.686.000	243.686.000	0
14	Peralatan Komputer	6	7.500.000	7.500.000	0
15	Sumur	1	78.000.000	78.000.000	0
16	Alat Kerja Penerbangan	22	4.121.167.999	2.240.744.500	1.880.423.499
B	Gedung dan Bangunan		30.921.904.645	4.410.440.395	26.511.464.250
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	8	16.469.887.645	1.975.568.429	14.494319216
2	Bangunan Gedung Tempat tinggal	14	1.948.000.000	390.122.307	1.557.877.693
3	Tugu /Tanda Batas	3	12.504.017.000	2.044.749.659	10.459.267.341
C	Jalan dan Jembatan		281.850.364.436	258.079.500.959	23.770.863.477
1	Jalan	60.678	281.850.364.436	258.079.500.959	23.770.863.477
D	Irigasi		10.114.059.519	4.302.116.506	5.811.943.013
1	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana	1	10.114.059.519	4.302.116.506	5.811.943.013
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap			356.928.419.349	281.913.438.121	75.014.981.228

Lampiran A2

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR

**INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

BA /UAPA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Eselon 1/UAPPA-E1 : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UAPPA-W : (2500) PAPUA
Satuan Kerja/UAKPA : (568678) KANTOR UPBU NUMFOR

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Numfor, 31 Desember 2025
Kepala Kantor UPBU Numfor



ARIE TRILAKSONO PUTRO

Penata Tk.I (III/d)

NIP.19761025 199803 1 001